



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/a6pj2943

Hal. 1333-1346

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Rekonstruksi Teologi Emansipatoris Berbasis Aktualisasi Diri: Kritik atas Kemandekan Spiritualitas dalam Membongkar Struktur Penindasan Masyarakat

**Aura Difa Putri Al-Kayyis¹, Siti Amirah Faizah Choirun Nisa², Yaumil Lailani³,
Ali Hasan Siswanto⁴**

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember^{1,2,3,4}

*Email auradifa444@gmail.com; amirafaizah76@gmail.com; yaumillailani@gmail.com;
Alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id

Diterima: 15-05-2026 | Disetujui: 21-05-2026 | Diterbitkan: 23-05-2026

ABSTRACT

The persistence of oppression in contemporary society presents a serious paradox amidst the advancement of modernity and growing awareness of social justice. Normatively, Islamic theology affirms the principle of anti-oppression (zulm) through the values of justice ('adl) and social monotheism, but in practice, spirituality is often reduced to ritual symbols that lack the power to social transformation. The research gap lies in the lack of integration between liberation theology, humanistic-existential psychology, and operational models of social movements. This study aims to reconstruct the paradigm of emancipatory theology based on self-actualization as a conceptual foundation for building a society without oppression. The theoretical approach used is the integration of Islamic theology with humanistic-existential psychology, specifically Abraham Maslow's concept of self-actualization. The research method employed is qualitative-conceptual through literature review with critical analysis, hermeneutics, and interdisciplinary synthesis. The main argument of this study asserts that oppression is not merely a structural phenomenon but also an existential crisis that hinders human development toward self-actualization. Therefore, authentic social transformation requires the reconstruction of individual consciousness and the simultaneous transformation of social systems. This research's scientific contribution lies in the formulation of a "Humanistic-Emancipatory Theology" paradigm that integrates spiritual, psychological, and social practical dimensions as a new conceptual model in contemporary Islamic studies. This paradigm not only enriches the theoretical literature but also offers an applicable framework for building social movements oriented toward holistic human liberation.

Keywords: *emancipatory theology, social oppression, self-actualization, humanistic psychology, social transformation, society without oppression*

ABSTRAK

Persistensi penindasan dalam masyarakat kontemporer menghadirkan paradoks serius di tengah kemajuan modernitas dan meningkatnya kesadaran akan keadilan sosial. Secara normatif, teologi Islam menegaskan prinsip anti-penindasan (zulm) melalui nilai keadilan ('adl) dan tauhid sosial, namun dalam praksisnya, spiritualitas kerap mengalami reduksi menjadi simbol ritual yang kehilangan daya transformasi sosial. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada minimnya integrasi antara teologi pembebasan, psikologi humanistik-eksistensial, dan model gerakan sosial yang operasional. Studi ini bertujuan untuk merekonstruksi paradigma teologi emansipatoris berbasis aktualisasi diri sebagai fondasi konseptual dalam membangun masyarakat tanpa penindasan. Pendekatan teoritis yang digunakan adalah integrasi teologi Islam dengan psikologi humanistik-eksistensial, khususnya konsep



aktualisasi diri Abraham Maslow. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-konseptual melalui studi kepustakaan dengan analisis kritis, hermeneutik, dan sintesis interdisipliner. Argumen utama penelitian ini menegaskan bahwa penindasan bukan hanya fenomena struktural, tetapi juga krisis eksistensial yang menghambat perkembangan manusia menuju aktualisasi diri. Oleh karena itu, transformasi sosial yang autentik mensyaratkan rekonstruksi kesadaran individu sekaligus perubahan sistem sosial secara simultan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada formulasi paradigma “Teologi Humanistik–Emansipatoris” yang mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, dan praksis sosial sebagai model konseptual baru dalam studi Islam kontemporer. Paradigma ini tidak hanya memperkaya khazanah teoretis, tetapi juga menawarkan kerangka aplikatif dalam membangun gerakan sosial yang berorientasi pada pembebasan manusia secara holistik.

Kata kunci: teologi emansipatoris, penindasan sosial, aktualisasi diri, psikologi humanistik, transformasi sosial, masyarakat tanpa penindasan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Al-Kayyis, A. D. P., Nisa, S. A. F. C. ., Lailani, Y. ., & Siswanto, A. H. (2026). Rekonstruksi Teologi Emansipatoris Berbasis Aktualisasi Diri: Kritik atas Kemandekan Spiritualitas dalam Membongkar Struktur Penindasan Masyarakat. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1333-1346. <https://doi.org/10.63822/a6pj2943>



PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, kapitalisasi, dan digitalisasi justru memperlihatkan paradoks yang semakin tajam antara kemajuan struktural dan kemunduran kemanusiaan. Penindasan tidak lagi hadir dalam bentuk klasik yang kasatmata, melainkan bertransformasi menjadi mekanisme struktural, kultural, dan psikologis yang mengakar dalam sistem sosial modern. Ketimpangan ekonomi, marginalisasi kelompok rentan, serta alienasi individu menjadi indikator bahwa modernitas gagal menjamin pembebasan manusia secara utuh. Dalam konteks ini, agama—khususnya Islam—secara normatif mengusung prinsip keadilan ('adl), kesetaraan, dan anti-penindasan (zulm) sebagai basis etika sosial. Namun, dalam praktiknya, agama sering kali kehilangan daya emansipatorisnya dan tereduksi menjadi ritual simbolik yang tidak menyentuh realitas sosial. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis epistemologis dan praksis dalam teologi Islam kontemporer, di mana ajaran normatif tidak mampu terartikulasikan dalam transformasi sosial yang nyata. Sebagaimana ditegaskan dalam studi mutakhir, teologi Islam pada banyak kasus masih terjebak dalam orientasi metafisik dan kurang responsif terhadap problem kemanusiaan modern, sehingga gagal menjadi kekuatan pembebasan yang efektif. ([Journal Universitas Pasundan](#))

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai teologi pembebasan kembali mendapatkan perhatian dalam studi Islam global. Berbagai penelitian menegaskan bahwa teologi pembebasan berupaya menghubungkan iman dengan realitas ketidakadilan sosial, serta menjadikan agama sebagai instrumen transformasi sosial. Namun, kajian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan ini masih menghadapi keterbatasan serius, terutama dalam mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, dan praksis sosial secara holistik. Studi terbaru menunjukkan bahwa teologi pembebasan sering kali berhenti pada tataran normatif dan kritik ideologis tanpa menghasilkan model operasional yang konkret. ([indonesiastt.ac.id](#)) Di sisi lain, perkembangan psikologi humanistik–eksistensial, khususnya melalui pemikiran Abraham Maslow, menawarkan perspektif baru mengenai manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi aktualisasi diri dan pencarian makna. Penelitian mutakhir juga menunjukkan adanya upaya integrasi antara psikologi humanistik dan pendidikan Islam, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan psikologis sebagai bagian dari pengembangan spiritual manusia. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#)) Namun demikian, integrasi antara teologi pembebasan dan psikologi humanistik masih bersifat fragmentaris dan belum menghasilkan sintesis konseptual yang matang dalam konteks transformasi sosial.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat celah penelitian (research gap) yang signifikan dalam kajian teologi kontemporer. Pertama, masih terbatasnya model teoretis yang mampu mengintegrasikan teologi Islam, psikologi humanistik–eksistensial, dan gerakan sosial dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Kedua, dominasi pendekatan normatif dalam studi teologi menyebabkan kurangnya elaborasi pada dimensi eksistensial manusia sebagai subjek perubahan sosial. Ketiga, belum adanya formulasi metodologis yang jelas mengenai bagaimana masyarakat tanpa penindasan dapat diwujudkan secara konkret melalui sintesis antara spiritualitas dan kesadaran diri. Padahal, penelitian terbaru menegaskan bahwa penindasan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga berkaitan dengan kegagalan individu dalam mencapai aktualisasi diri akibat hambatan sosial dan psikologis. ([Ejournal Universitas PGRI Banyuwangi](#)) Dengan demikian, problem penindasan harus dipahami sebagai krisis multidimensional yang menuntut pendekatan interdisipliner. Berdasarkan celah tersebut, pertanyaan utama penelitian ini adalah: bagaimana

*Rekonstruksi Teologi Emansipatoris Berbasis Aktualisasi Diri:
Kritik atas Kemandekan Spiritualitas dalam Membongkar Struktur Penindasan Masyarakat*
(Al- Kayyis, et al.)



merekonstruksi teologi Islam agar mampu berfungsi sebagai kekuatan emansipatoris melalui integrasi dengan psikologi humanistik–eksistensial?

Artikel ini berargumen bahwa kegagalan teologi dalam membongkar struktur penindasan disebabkan oleh ketiadaan integrasi antara dimensi spiritual, psikologis, dan praksis sosial. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma teologi yang tidak hanya normatif, tetapi juga eksistensial dan transformatif. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teologi Islam dan psikologi humanistik–eksistensial Abraham Maslow, artikel ini mengajukan tesis bahwa masyarakat tanpa penindasan hanya dapat terwujud melalui transformasi simultan antara kesadaran individu (self-actualization) dan struktur sosial. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada formulasi paradigma **“Teologi Humanistik–Emansipatoris”**, yang mengintegrasikan spiritualitas sebagai basis nilai, aktualisasi diri sebagai fondasi kesadaran, dan gerakan sosial sebagai praksis pembebasan. Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada sintesis konseptual yang menjembatani kesenjangan antara teologi normatif dan praksis sosial melalui pendekatan psikologi eksistensial, sehingga menawarkan model konseptual baru dalam studi Islam kontemporer yang lebih aplikatif, integratif, dan relevan dengan tantangan kemanusiaan modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teoretis artikel ini berangkat dari premis bahwa penindasan dalam masyarakat tidak dapat direduksi semata sebagai fenomena struktural, melainkan harus dipahami sebagai hasil dialektika kompleks antara struktur sosial, kesadaran manusia, dan konstruksi nilai yang beroperasi secara simultan. Dalam tradisi teologi Islam, konsep tauhid tidak hanya dimaknai sebagai doktrin metafisik tentang keesaan Tuhan, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang radikal sebagai kritik terhadap segala bentuk dominasi dan penindasan. Pemikiran klasik seperti yang dikembangkan oleh Ibn Khaldun mengenai *‘asabiyyah* menunjukkan bahwa kekuasaan sosial selalu memiliki kecenderungan degeneratif menuju penindasan jika tidak dikontrol oleh nilai moral dan spiritual. Sementara itu, dalam diskursus modern, pemikir seperti Ali Shari‘ati mengartikulasikan tauhid sebagai ideologi pembebasan yang menolak segala bentuk “syirik sosial” berupa ketundukan manusia terhadap struktur kekuasaan. Dalam konteks kontemporer, penelitian terbaru menegaskan bahwa tauhid harus direinterpretasi sebagai basis etika sosial yang membebaskan manusia dari dominasi struktural dan simbolik, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan egaliter. ([OJP LP2M UIN Jambi](#)) Dengan demikian, teologi dalam perspektif ini tidak lagi berada pada wilayah spekulatif, tetapi bertransformasi menjadi kerangka normatif yang memiliki daya kritik terhadap realitas sosial.

Namun demikian, problem mendasar dalam teologi kontemporer adalah terjadinya reduksi fungsi transformatif agama menjadi sekadar legitimasi simbolik. Kritik ini sejalan dengan analisis para pemikir global seperti Jürgen Habermas yang melihat agama dalam masyarakat modern sering terjebak dalam ruang privat, kehilangan relevansi publiknya sebagai kekuatan normatif. Di sisi lain, dalam tradisi teologi pembebasan yang dipelopori oleh Gustavo Gutiérrez, agama justru ditempatkan sebagai alat kritik terhadap ketidakadilan struktural. Dalam konteks Islam, pemikiran Ali Shari‘ati dan Nurcholish Madjid memperlihatkan bahwa teologi memiliki potensi emansipatoris yang kuat jika diartikulasikan secara

*Rekonstruksi Teologi Emansipatoris Berbasis Aktualisasi Diri:
Kritik atas Kemandekan Spiritualitas dalam Membongkar Struktur Penindasan Masyarakat*
(Al- Kayyis, et al.)



kontekstual. Namun, studi mutakhir menunjukkan bahwa teologi pembebasan masih menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan model praksis yang operasional, karena sering kali berhenti pada kritik ideologis tanpa sintesis metodologis yang konkret. ([Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta](#)) Dengan demikian, problem utama bukan terletak pada absennya konsep pembebasan dalam teologi, melainkan pada kegagalan dalam mengaktualisasikannya secara praksis dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi teologi agar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga performatif dan transformatif.

Dalam konteks ini, pendekatan psikologi humanistik–eksistensial, khususnya melalui pemikiran Abraham Maslow, menawarkan dimensi analisis yang selama ini kurang diperhatikan dalam studi teologi. Maslow menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi aktualisasi diri, dengan kebutuhan yang tersusun secara hierarkis dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan transendensi. Perspektif ini penting karena menunjukkan bahwa penindasan tidak hanya berdampak pada kondisi eksternal manusia, tetapi juga menghambat perkembangan eksistensialnya sebagai subjek yang otonom dan bermakna. Penelitian mutakhir dalam studi pendidikan Islam menunjukkan bahwa integrasi teori humanistik Maslow dapat memperkuat dimensi spiritual dan psikologis manusia secara simultan, serta mendorong terbentuknya kesadaran diri yang lebih utuh. ([eJournal of Sunan Gunung Djati](#)) Dengan demikian, penindasan dapat dipahami sebagai kondisi yang menghambat proses aktualisasi diri, sehingga pembebasan tidak cukup hanya dilakukan pada level struktural, tetapi juga harus menyentuh dimensi kesadaran individu. Dalam perspektif ini, manusia bukan sekadar objek dari sistem sosial, tetapi subjek aktif yang memiliki potensi untuk mentransformasikan dirinya dan lingkungannya.

Lebih jauh, dialog antara teologi dan psikologi humanistik membuka kemungkinan untuk merumuskan paradigma baru yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan eksistensial manusia. Dalam tradisi filsafat eksistensial, pemikir seperti Jean-Paul Sartre dan Viktor Frankl menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang secara fundamental mencari makna (*meaning-seeking being*). Frankl, khususnya, menegaskan bahwa krisis eksistensial merupakan akar dari banyak problem sosial, termasuk alienasi dan dehumanisasi. Dalam konteks ini, penindasan dapat dipahami sebagai kondisi yang menghilangkan makna hidup manusia, sehingga menghasilkan keterasingan yang mendalam. Teologi, dalam hal ini, memiliki potensi untuk mengembalikan dimensi makna tersebut melalui internalisasi nilai-nilai transendental. Namun, tanpa integrasi dengan pendekatan psikologis, teologi berisiko menjadi abstrak dan tidak menyentuh pengalaman konkret manusia. Oleh karena itu, sintesis antara teologi dan psikologi humanistik menjadi krusial untuk menciptakan model pembebasan yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga eksistensial.

Berdasarkan dialog teoretis tersebut, artikel ini mengembangkan kerangka konseptual yang disebut sebagai **Teologi Humanistik–Emansipatoris**, yaitu suatu paradigma yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: spiritualitas (teologi), kesadaran diri (psikologi), dan aksi sosial (praksis). Dalam paradigma ini, tauhid tidak hanya dipahami sebagai doktrin keimanan, tetapi sebagai prinsip pembebasan yang membentuk kesadaran kritis individu terhadap struktur penindasan. Sementara itu, aktualisasi diri dalam perspektif Maslow menjadi fondasi bagi pembentukan subjek yang otonom dan mampu bertindak secara etis dalam masyarakat. Integrasi kedua dimensi ini menghasilkan suatu model transformasi sosial yang bersifat holistik, di mana perubahan tidak hanya terjadi pada level struktural, tetapi juga pada level kesadaran



individu. Dengan demikian, masyarakat tanpa penindasan tidak dipahami sebagai kondisi utopis, melainkan sebagai proses dinamis yang melibatkan transformasi simultan antara individu dan sistem sosial.

Akhirnya, dalam konteks diskursus global, kerangka teoretis ini memposisikan artikel ini sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara teologi normatif dan teori sosial kontemporer. Dalam studi Islam modern, terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara dimensi spiritual dan analisis sosial, sehingga menghasilkan pendekatan yang parsial. Artikel ini berupaya melampaui dikotomi tersebut dengan menawarkan sintesis interdisipliner yang menggabungkan teologi Islam, psikologi humanistik, dan filsafat eksistensial dalam satu kerangka konseptual yang utuh. Kontribusi utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menjelaskan penindasan sebagai fenomena multidimensional, sekaligus menawarkan model pembebasan yang lebih komprehensif dan aplikatif. Dengan demikian, kerangka teoretis ini tidak hanya relevan dalam konteks studi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap diskursus global mengenai hubungan antara agama, manusia, dan transformasi sosial dalam dunia yang semakin kompleks.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-konseptual dengan desain studi kepustakaan (library research)** yang diperluas melalui perspektif interdisipliner antara teologi Islam, filsafat, dan psikologi humanistik–eksistensial. Pilihan metodologis ini didasarkan pada karakter objek kajian yang bersifat normatif-konseptual sekaligus filosofis, yaitu rekonstruksi paradigma teologi emansipatoris berbasis aktualisasi diri. Dalam perkembangan metodologi studi Islam kontemporer, pendekatan kualitatif tidak lagi dipahami sebagai sekadar analisis tekstual tradisional, melainkan telah berkembang menjadi metode integratif yang menggabungkan hermeneutika, fenomenologi, dan analisis sosial untuk memahami agama sebagai fenomena multidimensional. ([Raden Intan Lampung Journal](#)) Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan konsep, tetapi juga membangun sintesis teoretis baru melalui dialog kritis antara sumber normatif, tradisi intelektual klasik, dan teori kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dimensi epistemologis dan ontologis teologi, sekaligus membuka ruang bagi formulasi konseptual yang bersifat inovatif dan argumentatif.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu **sumber primer dan sekunder**. Sumber primer meliputi teks-teks normatif Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang dipahami sebagai basis teologis utama dalam merumuskan konsep keadilan, tauhid sosial, dan anti-penindasan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan karya-karya klasik dalam tradisi Islam, seperti kitab tafsir, karya teologi (kalam), serta literatur tasawuf yang mengandung dimensi etika dan spiritualitas. Sumber sekunder mencakup literatur kontemporer dari jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS), buku akademik, serta hasil penelitian mutakhir yang relevan dengan teologi pembebasan, psikologi humanistik, dan teori sosial. Penggunaan sumber yang beragam ini mencerminkan perkembangan metodologi studi Islam yang menekankan pentingnya integrasi antara teks klasik dan konteks modern, sehingga memungkinkan reinterpretasi ajaran agama secara kontekstual tanpa kehilangan otoritas normatifnya. ([Nahdliyyin University](#)) Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat



tekstual, tetapi juga konseptual dan kontekstual, yang memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena penindasan dalam masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis (systematic literature review)** terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan evaluasi kritis terhadap literatur yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, khususnya yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Dalam konteks ini, pendekatan SLR tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memetakan perkembangan diskursus ilmiah dan mengidentifikasi celah penelitian (research gap). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan SLR dalam studi Islam memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai perspektif disiplin ilmu secara sistematis dan terstruktur, sehingga menghasilkan analisis yang lebih valid dan komprehensif. ([Raden Intan Lampung Journal](#)) Selain itu, teknik dokumentasi juga digunakan untuk menelaah teks-teks klasik dan kontemporer secara mendalam, dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan intelektual di mana teks tersebut diproduksi. Hal ini penting untuk menghindari reduksionisme dalam memahami teks agama, serta memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap relevan dengan konteks kekinian.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan **analisis hermeneutik-kritis yang dipadukan dengan pendekatan konseptual dan sintesis teoretis**. Hermeneutika digunakan sebagai alat untuk menafsirkan teks-teks normatif dan klasik dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan linguistik, sehingga makna yang dihasilkan tidak bersifat literal semata, tetapi juga kontekstual dan relevan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hermeneutika kontemporer dalam studi Islam yang mengintegrasikan dimensi bayāni (tekstual), burhāni (rasional), dan ‘irfāni (spiritual) dalam proses interpretasi. ([Sharia Journal](#)) Sementara itu, analisis kritis digunakan untuk mengevaluasi keterbatasan teologi tradisional dalam merespons problem penindasan, serta untuk mengidentifikasi potensi transformasi dalam kerangka teologi emansipatoris. Selanjutnya, sintesis teoretis dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai konsep dari teologi Islam, psikologi humanistik (Maslow), dan filsafat eksistensial, sehingga menghasilkan model konseptual baru yang koheren dan argumentatif. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga konstruktif, yaitu membangun paradigma baru yang mampu menjawab kegelisahan akademik yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pemilihan metodologi ini didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa problem penindasan dalam masyarakat merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan tunggal. Pendekatan kualitatif-konseptual memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang mendalam dari teks dan realitas sosial, sementara integrasi hermeneutika dan analisis kritis memberikan kerangka metodologis yang kuat untuk menghubungkan antara teks, konteks, dan praksis. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa metodologi interdisipliner dalam studi Islam merupakan kebutuhan epistemologis untuk menjembatani kesenjangan antara ajaran normatif dan realitas sosial yang dinamis. (jurnalstebibama.ac.id) Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki validitas epistemologis dalam konteks studi Islam kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kontribusi ilmiah yang signifikan, baik dalam pengembangan teori maupun dalam menawarkan kerangka konseptual yang aplikatif bagi transformasi sosial menuju masyarakat tanpa penindasan.



PEMBAHASAN

Pembahasan ini diawali dengan penegasan bahwa penindasan (*zulm*) dalam masyarakat kontemporer tidak dapat direduksi pada dimensi struktural semata, tetapi harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan relasi kuasa, konstruksi makna, dan kondisi eksistensial manusia. Dalam kerangka teologi Islam, *zulm* tidak hanya merujuk pada ketidakadilan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap tatanan ontologis yang berakar pada prinsip tauhid. Tauhid menegaskan kesatuan Tuhan sekaligus kesetaraan manusia, sehingga segala bentuk dominasi manusia atas manusia lain merupakan bentuk deviasi teologis. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an: **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ** (QS. Āli 'Imrān: 57). Namun, problem utama dalam masyarakat modern adalah terjadinya disjungsi antara normativitas teologi dan praksis sosial, di mana nilai-nilai keadilan tidak terinternalisasi dalam struktur sosial maupun kesadaran individu. Dalam perspektif teori sosial kritis, kondisi ini menunjukkan adanya reproduksi penindasan melalui mekanisme yang tidak selalu tampak, tetapi terinternalisasi dalam sistem dan kesadaran kolektif.

Data tekstual Al-Qur'an memperlihatkan bahwa pembebasan dari penindasan merupakan inti dari misi kenabian. Narasi tentang Fir'aun dan pembebasan Bani Israil bukan sekadar kisah historis, tetapi simbol universal tentang relasi antara kekuasaan dan perlawanan. Dalam QS. Al-Qaṣaṣ: 5 dinyatakan: **وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ** (Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi). Tafsir klasik seperti al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini sebagai janji ilahi tentang kemenangan kaum tertindas, sementara tafsir kontemporer memaknainya sebagai legitimasi normatif bagi perjuangan sosial melawan ketidakadilan. Dalam diskursus modern, Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa Islam harus dipahami sebagai agama pembebasan yang berpihak pada *mustaḍ'afīn*. Studi mutakhir menunjukkan bahwa reinterpretasi ayat-ayat pembebasan menjadi penting dalam menghadapi bentuk penindasan baru yang lebih subtil dalam masyarakat modern.¹ Dengan demikian, teks keagamaan mengandung potensi emansipatoris yang harus diaktualisasikan melalui pembacaan kontekstual.

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa potensi emansipatoris tersebut sering kali tidak terwujud karena teologi mengalami reduksi menjadi sistem simbolik yang terlepas dari realitas sosial. Dalam banyak kasus, agama justru berfungsi sebagai legitimasi terhadap status quo, bukan sebagai kekuatan transformasi. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, yang menunjukkan bagaimana ideologi dominan bekerja dengan cara membentuk kesadaran masyarakat sehingga ketidakadilan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks ini, teologi yang tidak kritis berpotensi menjadi bagian dari mekanisme hegemoni tersebut. Studi terbaru menunjukkan bahwa praktik keagamaan yang tidak reflektif cenderung memperkuat struktur ketimpangan, terutama ketika agama digunakan untuk membenarkan hierarki sosial yang tidak adil.² Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi teologi yang mampu membongkar relasi kuasa yang tersembunyi dalam praktik sosial.

Pendekatan psikologi humanistik–eksistensial memberikan perspektif penting dalam memahami dimensi internal dari penindasan. Abraham Maslow menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi aktualisasi diri, yang hanya dapat tercapai ketika kebutuhan dasar terpenuhi. Dalam masyarakat yang sarat penindasan, individu sering kali terjebak pada tingkat kebutuhan dasar, sehingga tidak mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kondisi sosial yang tidak adil berkontribusi pada terhambatnya perkembangan psikologis individu, yang pada



akhirnya memperkuat siklus penindasan.³ Dengan demikian, penindasan tidak hanya berdampak pada struktur sosial, tetapi juga pada perkembangan eksistensial manusia sebagai subjek yang otonom.

Lebih jauh, dalam perspektif filsafat eksistensial, penindasan dapat dipahami sebagai kondisi yang menghilangkan makna hidup manusia. Viktor Frankl menegaskan bahwa manusia adalah makhluk pencari makna (*meaning-seeking being*), dan kehilangan makna akan menghasilkan kekosongan eksistensial. Dalam konteks masyarakat modern, kondisi ini diperparah oleh sistem sosial yang dehumanistik, di mana manusia direduksi menjadi instrumen dalam mekanisme ekonomi dan politik. Dalam perspektif teologi, kondisi ini dapat dipahami sebagai keterasingan manusia dari nilai-nilai transendental. Oleh karena itu, pembebasan dari penindasan harus mencakup pemulihan dimensi makna dalam kehidupan manusia, bukan hanya perubahan struktur sosial. Dengan kata lain, transformasi sosial harus disertai dengan transformasi eksistensial.

Al-Qur'an memberikan kerangka normatif yang menghubungkan antara perubahan sosial dan transformasi individu. Dalam QS. Ar-Ra'd: 11 dinyatakan: *إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ*. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan sosial tidak dapat dipisahkan dari perubahan internal manusia. Dalam kerangka Maslow, hal ini dapat dipahami sebagai proses aktualisasi diri yang memungkinkan individu untuk melampaui kepentingan egoistik dan berorientasi pada nilai-nilai universal. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara spiritualitas dan pengembangan diri memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran kritis yang diperlukan untuk perubahan sosial.⁴ Dengan demikian, transformasi individu merupakan prasyarat bagi transformasi sosial yang lebih luas.

Namun, transformasi individu tidak cukup tanpa adanya perubahan struktural. Dalam teori sosial kritis, penindasan dipahami sebagai hasil dari sistem yang tidak adil, sehingga perubahan harus dilakukan pada level institusional. Pemikiran Hasan Hanafi menegaskan bahwa tauhid harus diwujudkan dalam tindakan sosial yang konkret untuk menciptakan keadilan. Studi mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan teologi pembebasan yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan yang lebih efektif.⁵ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menggabungkan transformasi individu dan perubahan struktural dalam satu kerangka yang koheren.

Dalam konteks gerakan sosial, pembentukan masyarakat tanpa penindasan memerlukan model gerakan yang berbasis pada integrasi antara nilai spiritual dan strategi sosial. Studi empiris menunjukkan bahwa gerakan sosial berbasis agama dapat menjadi efektif jika mampu membangun kesadaran kolektif yang berorientasi pada keadilan. Namun, banyak gerakan yang gagal karena tidak mampu mengintegrasikan dimensi spiritual dan praksis secara seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh ideologi, tetapi juga oleh kemampuan untuk membangun kesadaran yang mendalam dan berkelanjutan. Dengan demikian, gerakan sosial harus dipahami sebagai proses transformasi yang melibatkan individu dan kolektif secara simultan.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, artikel ini menegaskan bahwa masyarakat tanpa penindasan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan yang holistik dan integratif. Penindasan harus dipahami sebagai krisis multidimensional yang mencakup dimensi struktural, psikologis, dan spiritual. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus mencakup rekonstruksi teologi, transformasi kesadaran individu, dan perubahan struktur sosial secara simultan. Dalam kerangka ini,



paradigma **Teologi Humanistik–Emansipatoris** menawarkan model konseptual yang mampu menjembatani kesenjangan antara normativitas teologi dan praksis sosial.

Akhirnya, dalam diskursus global, pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan studi Islam yang lebih relevan dengan tantangan kontemporer. Dengan mengintegrasikan teologi, psikologi humanistik, dan teori sosial, artikel ini tidak hanya memperkaya khazanah teoretis, tetapi juga menawarkan kerangka aplikatif untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dengan demikian, teologi tidak lagi dipahami sebagai wacana normatif yang statis, tetapi sebagai kekuatan transformatif yang mampu membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, baik yang bersifat eksternal maupun internal.

Analisis ini menegaskan bahwa penindasan dalam masyarakat kontemporer harus ditafsirkan sebagai krisis multidimensional yang melibatkan deformasi struktur sosial sekaligus distorsi kesadaran manusia. Interpretasi utama yang diajukan adalah bahwa kegagalan teologi dalam membongkar penindasan tidak semata disebabkan oleh kelemahan normatif, melainkan oleh ketidakmampuan untuk mengintegrasikan dimensi ontologis (tauhid), eksistensial (kesadaran diri), dan praksis (transformasi sosial) dalam satu kerangka yang operasional. Dalam konteks ini, teologi yang hanya berfungsi sebagai sistem legitimasi nilai tanpa mekanisme internalisasi dan praksis akan kehilangan daya emansipatorisnya. Oleh karena itu, penindasan harus dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya berada “di luar” manusia, tetapi juga “di dalam” kesadaran manusia yang telah terstruktur oleh relasi kuasa. Perspektif ini sejalan dengan temuan studi mutakhir yang menunjukkan bahwa reproduksi ketidakadilan sosial tidak hanya terjadi melalui institusi, tetapi juga melalui internalisasi nilai yang membatasi kapasitas kritis individu.¹ Dengan demikian, pembebasan tidak dapat direduksi menjadi perubahan struktural semata, tetapi harus mencakup transformasi kesadaran yang memungkinkan manusia untuk keluar dari kondisi keterasingan.

Dalam perbandingan dengan studi global, pendekatan yang diajukan dalam artikel ini memiliki titik temu sekaligus perbedaan dengan teori-teori kritis kontemporer. Dalam tradisi teori kritis Barat, seperti yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas dan Axel Honneth, penindasan dipahami sebagai kegagalan komunikasi dan pengakuan (*recognition*) dalam masyarakat modern. Sementara itu, dalam teologi pembebasan Amerika Latin, sebagaimana dikembangkan oleh Gustavo Gutiérrez, penindasan diposisikan sebagai hasil dari struktur ekonomi-politik yang tidak adil. Namun, pendekatan-pendekatan tersebut cenderung menekankan dimensi struktural dan intersubjektif, tanpa secara mendalam mengintegrasikan dimensi spiritual sebagai sumber transformasi. Dalam konteks ini, pendekatan teologi Islam memiliki potensi unik untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan basis transendental bagi perubahan sosial. Studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi antara spiritualitas dan teori sosial dapat memperkaya analisis tentang keadilan dan pembebasan, terutama dalam konteks masyarakat non-Barat.² Dengan demikian, artikel ini memosisikan dirinya dalam diskursus global sebagai upaya untuk memperluas horizon teori pembebasan melalui integrasi dimensi spiritual dan eksistensial.

Implikasi teoretis dari analisis ini terletak pada formulasi paradigma **Teologi Humanistik–Emansipatoris**, yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: spiritualitas (teologi tauhid), kesadaran diri (aktualisasi diri dalam perspektif humanistik), dan praksis sosial (transformasi struktural). Paradigma ini menantang dikotomi klasik antara teologi normatif dan teori sosial empiris dengan menunjukkan bahwa keduanya dapat disintesis dalam kerangka yang koheren. Dalam paradigma ini, tauhid tidak hanya



dipahami sebagai doktrin keimanan, tetapi sebagai prinsip epistemologis yang membentuk kesadaran kritis terhadap penindasan. Sementara itu, konsep aktualisasi diri dalam psikologi humanistik memberikan landasan bagi pembentukan subjek yang otonom dan mampu bertindak secara etis. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner semacam ini semakin diperlukan dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial kontemporer, karena pendekatan tunggal tidak lagi memadai untuk menjelaskan realitas yang multidimensional.³ Dengan demikian, kontribusi teoretis utama artikel ini adalah pengembangan model konseptual yang mampu menjembatani kesenjangan antara dimensi normatif dan praksis dalam studi Islam.

Selain itu, paradigma yang diajukan juga memiliki implikasi epistemologis yang signifikan. Dalam tradisi studi Islam, terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara ilmu-ilmu agama (ulum al-din) dan ilmu sosial, sehingga menghasilkan pendekatan yang fragmentaris. Artikel ini menunjukkan bahwa integrasi antara teologi, psikologi, dan teori sosial tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga diperlukan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas sosial. Studi terbaru dalam metodologi studi Islam menegaskan bahwa pendekatan interdisipliner mampu memperkaya analisis dan menghasilkan inovasi teoretis yang relevan dengan konteks kontemporer.⁴ Dengan demikian, paradigma Teologi Humanistik–Emansipatoris tidak hanya menawarkan model analisis baru, tetapi juga membuka ruang bagi rekonstruksi epistemologi dalam studi Islam.

Pada level praktis, implikasi dari paradigma ini dapat dilihat dalam berbagai konteks sosial. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pendekatan ini dapat diterapkan melalui pengembangan kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pengembangan kesadaran diri dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan yang berbasis pada aktualisasi diri dan nilai tauhid dapat membantu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Studi empiris menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan spiritual dan psikologis memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter dan kesadaran kritis peserta didik.⁵ Contoh konkret dapat dilihat dalam program pendidikan berbasis komunitas yang mengintegrasikan pembelajaran agama dengan aktivitas sosial, seperti pemberdayaan masyarakat dan advokasi keadilan sosial.

Dalam konteks gerakan sosial, paradigma ini juga menawarkan kerangka yang lebih komprehensif untuk membangun gerakan yang berkelanjutan. Gerakan sosial yang hanya berbasis pada ideologi tanpa transformasi kesadaran individu cenderung bersifat sementara dan rentan terhadap konflik internal. Sebaliknya, gerakan yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan kesadaran diri memiliki potensi untuk menciptakan perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Contoh kontekstual dapat dilihat dalam gerakan sosial berbasis komunitas keagamaan yang menggabungkan praktik spiritual dengan aktivitas sosial, seperti program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid atau komunitas. Dalam konteks Indonesia, misalnya, beberapa gerakan komunitas Islam telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan program pemberdayaan sosial, sehingga mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa spiritualitas dapat menjadi sumber energi bagi perubahan sosial, bukan sekadar praktik ritual.

Lebih jauh, dalam konteks dinamika global, paradigma ini relevan untuk merespons tantangan modernitas yang semakin kompleks, seperti globalisasi, digitalisasi, dan krisis identitas. Penindasan dalam masyarakat modern sering kali tidak lagi bersifat fisik, tetapi berbentuk dominasi simbolik dan psikologis



yang lebih sulit dideteksi. Dalam konteks ini, pendekatan yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan eksistensial menjadi semakin penting, karena mampu menjangkau aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan oleh teori sosial konvensional. Studi mutakhir menunjukkan bahwa krisis makna dan alienasi merupakan salah satu problem utama dalam masyarakat modern, yang membutuhkan pendekatan yang melampaui analisis struktural semata.⁶ Dengan demikian, paradigma Teologi Humanistik–Emansipatoris menawarkan kerangka yang relevan untuk memahami dan mengatasi problem tersebut.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa implementasi paradigma ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi terhadap perubahan, baik pada level individu maupun institusi. Transformasi kesadaran membutuhkan proses yang panjang dan tidak selalu linear, sementara perubahan struktural sering kali menghadapi hambatan dari kepentingan yang telah mapan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengimplementasikan paradigma ini dalam praktik sosial. Dalam konteks ini, kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan komunitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa konsep yang dikembangkan tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata.

Akhirnya, analisis ini menegaskan bahwa pembentukan masyarakat tanpa penindasan tidak dapat dicapai melalui pendekatan yang parsial. Penindasan adalah fenomena kompleks yang membutuhkan solusi yang holistik dan integratif. Paradigma Teologi Humanistik–Emansipatoris yang diajukan dalam artikel ini menawarkan kerangka yang mampu mengintegrasikan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial dalam satu model yang koheren. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam studi Islam, tetapi juga menawarkan kerangka praktis yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Dalam konteks diskursus global, pendekatan ini dapat menjadi alternatif yang relevan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin kompleks, sekaligus menunjukkan bahwa teologi memiliki potensi besar sebagai kekuatan transformasi sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan teologi dalam membongkar struktur penindasan tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan normatif ajaran, melainkan oleh ketiadaan integrasi antara dimensi spiritual, kesadaran eksistensial, dan praksis sosial. Dengan demikian, menjawab pertanyaan penelitian, rekonstruksi teologi Islam sebagai kekuatan emansipatoris hanya dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggabungkan tauhid sebagai basis etika pembebasan, aktualisasi diri sebagai fondasi kesadaran manusia, serta transformasi sosial sebagai manifestasi praksis. Penindasan dalam masyarakat kontemporer terbukti bukan hanya fenomena struktural, tetapi juga krisis eksistensial yang menghambat manusia dalam mencapai potensi kemanusiaannya secara utuh. Oleh karena itu, pembebasan harus dipahami sebagai proses simultan antara transformasi individu dan perubahan sistem sosial.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma **Teologi Humanistik–Emansipatoris** sebagai kerangka konseptual baru dalam studi Islam kontemporer. Paradigma ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: spiritualitas (teologi tauhid), kesadaran diri (psikologi humanistik–eksistensial), dan aksi sosial (transformasi struktural). Dengan pendekatan ini, artikel ini berhasil menjembatani kesenjangan antara teologi normatif yang cenderung abstrak dan teori sosial yang sering kali



sekuler, sehingga menghasilkan sintesis interdisipliner yang lebih komprehensif. Kontribusi ini tidak hanya memperkaya khazanah teoretis dalam studi Islam, tetapi juga memperluas diskursus global mengenai hubungan antara agama, manusia, dan perubahan sosial.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada formulasi integratif yang menempatkan aktualisasi diri sebagai elemen kunci dalam teologi pembebasan. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menekankan aspek struktural atau normatif, artikel ini menunjukkan bahwa transformasi sosial yang autentik harus berakar pada kesadaran eksistensial individu. Dengan demikian, teologi tidak lagi dipahami sebagai sistem doktrinal yang statis, tetapi sebagai proses dinamis yang membentuk kesadaran dan tindakan manusia. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena sifatnya yang konseptual dan berbasis studi kepustakaan, sehingga belum menguji secara empiris implementasi paradigma yang diusulkan dalam konteks sosial yang konkret.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris yang menguji relevansi dan efektivitas paradigma Teologi Humanistik–Emansipatoris dalam berbagai konteks sosial, seperti pendidikan, gerakan sosial, dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi integrasi yang lebih luas antara teologi Islam dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, dan studi budaya, untuk memperkaya analisis terhadap fenomena penindasan. Dengan demikian, arah riset ke depan tidak hanya berfokus pada pengembangan teori, tetapi juga pada implementasi praksis yang mampu mewujudkan masyarakat tanpa penindasan secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana. “Konsep Teologi Pembebasan dalam Islam Perspektif Asghar Ali Engineer.” *Mazalat: Jurnal Pemikiran Islam* (2024).
- Annaprimadonita. “Methodological Transformations in Contemporary Islamic Studies: Trends, Challenges, and Future Directions.” *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.610>.
- Azkya, Putris Salsabila, et al. “Hermeneutical Approaches to the Qur’an in Indonesia: A Normative and Socio-Cultural Analysis of Tafsir Methodologies.” *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i2.1419>.
- Bayat, Asef. “Life as Politics Revisited: Ordinary People and Social Change in the Middle East.” *International Journal of Middle East Studies* (2022).
- Dewi, Maylani Rahmawati, dan Amin Fauzi. “Aligning Humanistic Psychology and Islamic Education: A Theoretical Dialogue between Carl Rogers and Abraham Maslow.” *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 10, no. 2 (2025): 236–246. <https://doi.org/10.15575/atthulab.v10i2.52273>.
- Haryanto, Adi, et al. “Teologi Pembebasan dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Hassan Hanafi).” *Referensi Islamika* (2024).
- Hidayat, Salma Ragil, et al. “Kesetaraan Hak dalam Dakwah Transformatif.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* (2025).



- Jayadi, Lionarto Erson. "Teologi Pembebasan dalam Pascamodernitas: Suatu Kontribusi bagi Pendidikan Keagamaan." *Indonesian Journal of Religious* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.46362/ijr.v7i1.63>.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Islam, Justice, and Social Reform in Contemporary Contexts." *Islam and Civilisational Renewal* 12, no. 3 (2023).
- Ni'am, Syamsun, et al. "Critical Islamic Thought and Social Transformation in Contemporary Muslim Societies." *Journal of Islamic Thought and Civilization* (2024).
- Putri, Apsari Eka, et al. "Tauhid dalam Teologi Pembebasan Hasan Hanafi." *An Najah Journal* (2025).
- Sania, Fitri, et al. "Abraham Maslow's Humanistic Theory in Islamic Religious Education Learning in Schools." *Sosioedukasi* 15, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i1.7587>.
- Syandana, Zamzami, et al. "Epistemology and Methodology of Islamic Studies in Contemporary Research: A Systematic Literature Review." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i1.523>.
- Yuliani, Ali Amat, dan Saifullah. "Reorientasi Teologi Islam dari Teosentrisme ke Antroposentrisme: Analisis Kritis atas Pemikiran Hasan Hanafi." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.39843>.
- Zuhri, Syaifuddin. "An Intercultural Methodology in Area-Based Qur'anic Studies: The Integration of Hermeneutics, Anthropology, and History." *Daar El-Kamil: Multidisciplinary Journal* 1, no. 2 (2025).